BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Latar Belakang *Peacekeeping English Project* (PEP)

Sejarah kerjasama Indonesia dan Inggris telah terjalin selama hampir lebih dari 60 tahun lamanya (sejak 1949), namun kerjasama dalam usaha peningkatan kemampuan bahasa Inggris Tentara Perdamaian Indonesia telah di inisiasi atau dimulai perencanaannya sejak tahun 2008. Namun karena masalah pendanaan, faktor politik dan proses administrasi serta tempat yang masih dalam tahap penyelesaian, program *Peacekeeping English Project* baru dijalankan sejak akhir tahun 2012.

Hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh Mr. Colm Downes dalam wawancara (14-08-2013), dia menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk kesepakatan dari tiga instansi yakni Pusat Misi Penjaga Perdamaian Indonesia (PMPP) yang diwakili oleh Brigadir Imam Edy Mulyono, Kementrian Pertahanan Negara Inggris yang diwakili oleh Colonel Phillips, dan British Council yang diwakili oleh Danny Whitehead selaku *Head of English Development of British Council.* Merekalah yang kemudian menjadi penggagas dari program *Peacekeeping English Project.*

Dalam rencana kerjasama ini, *British Council* menyambut dengan baik dan mengambil peran yang sangat besar dalam program yang menyatukan kedua negara; *British Council* menjadi salah satu yang mengambil memimpin di sektor pendidikan dan menempati peringkat di atas agenda untuk kedua pemerintah.

Gambar 4.1 Alur Kerjasama PMPP, Kementrian Pertahanan Inggris dan *British Council* (Colm Downes, 2013)



Keterangan :

1 : Kementrian Pertahanan Inggris

2 : British Council

3 : Pusat Misi Penjaga Perdamaian (PMPP)

Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa *Peacekeeping English Project* adalah suatu program yang dibentuk atas kerjasama dua negara yaitu Indonesia melalui PMPP dan Inggris melalui *British Council*. Program ini didanai sepenuhnya oleh Kementrian Pertahanan Inggris. Kementrian Pertahanan Inggris (*Ministry of Defence*) mengembangkan program *Peacekeeping English Project* ini sejak tahun 2008 di 25 (dua puluh lima) negara diseluruh dunia dengan sasaran Eropa Tengah, Eropa Timur, Asia Tengah dan beberapa negara asia termasuk Indonesia.

Pada bulan Maret 2013 Menteri Pertahanan Inggris mengumumkan dana tahunan sebesar 839 *Milyar Poundsterling* digunakan untuk pembiayaan resolusi konflik, sumbangan kepada PBB dan Uni Eropa dalam program misi perdamaian seperti di Darfur dan Somalia, dan untuk pembiayaan program-program lainnya seperti *Peacekeeping English Project.* Kementrian Pertahanan Inggris pula telah mencanangkan dana tambahan sebesar 107 *Milyar Poundsterling* untuk pembiayaan pelatihan tentara perdamaian di Amerika tengah dan negara lainnya. Untuk *Peacekeeping English Project* disetiap negara penyelenggara, Kementrian Pertahanan Inggris memberikan bantuan dana sebesar 120,000 *Poundsterling* pada setiap tahunnya termasuk pembiayaan 15% untuk *British Council*.

Adapun latar belakang diadakannya program *English for Peacekeepers* ini sesuai dengan pemaparan Mr. Colm Downes (14/08/2013) adalah dimana pemerintah Indonesia dengan bantuan Kementrian Pertahanan Inggris ingin meningkatkan kemampuan bahasa asing dari para tentara perdamaian dimana mereka diharapkan untuk dapat berkomunikasi secara efektif di misi yang telah ditugaskan, seperti contohnya di Darfur, Libanon, dan negara lain dimana pasukan perdamaian Indonesia ditempatkan. Diharapkan setelah para pasukan perdamaian Indonesia mengikuti *Peacekeeping English Project*, maka kemampuan bahasa mereka akan meningkat dan diimbangi dengan keberhasilan misi yang mereka emban.

Menurut Colm, Indonesia dimasa yang akan mendatang melalui PMPP ingin menjadi pusat pelatihan tentara pasukan perdamaian di Asia khususnya di Asia Tenggara. Maka tentara pasukan perdamaian yang berpartisipasi nantinya tidak hanya

dari TNI namun dari berbagai negara tetangga seperti Phillipina, Thailand, dan negara lain. Dengan diresmikannya *Peacekeeping Center* pada 19 Desember 2011 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka Pusat Pemeliharaan Misi Perdamaian (PMPP) ini akan menjadi sarana pendidikan dan latihan bersama untuk operasi perdamaian, penanggulangan bencana, penanganan terorisme, *standby force*, dan universitas pertahanan dari berbagai tentara perdamaian internasional. Namun seperti kita ketahui, bahasa asing yang dipergunakan dinegara-negara tersebut adalah bahasa Inggris, maka pelatihan bagi tentara perdamaian multinasional tersebut akan disampaikan dengan bahasa Inggris. Sebagai contoh adanya *Joint Exercise, Course, and PKC Commander Conference* (GPOI USPACOM) pada tanggal 23 April dan ditutup pada Jumat, 4 Mei 2012, diikuti oleh 70 orang perwira, yaitu 45 orang perwira TNI dari 3 angkatan dan 25 orang perwira asing berasal dari Bangladesh, Kamboja, Malaysia, Mongolia, Nepal, Philipina, Sri Lanka dan Thailand.

Colm menjelaskan bahwa materi pelatihan yang digunakan dalam kelas *Peacekeeping English Project* semuanya berasal langsung dari PBB, dan sebagian besar materi tersebut menggunakan bahasa Inggris yang terdiri dari slide presentasi, buklet, dan berbagai jenis informasi yang harus tentara perdamaian pelajari adalah berbahasa Inggris. Maka *British Council* memberikan bantuan dengan memfasilitasi pelatihan tersebut dengan memberikan instruktur asing *(native speaker)* yang mengajar di PMPP. Sampai dengan 2013 ini tercatat hanya satu orang instruktur asing berkebangsaan Inggris yaitu Mr. Colm Downes yang merangkap sebagai *Project Manager Peacekeeping English Project* di Indonesia.

Namun tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang, akan ada penambahan baik intruktur bahasa Inggris lokal maupun mendatangkan *native speaker* lain yang akan mengajar di kelas bahasa di PMPP Sentul – Bogor.

Menurut Colm, dengan tercapainya tujuan dari pembentukan pusat pelatihan tentara pasukan perdamaian ditingkat nasional maupun Asia Tenggara, maka Indonesia akan mendapat pengakuan secara legal dari PBB dimana Indonesia akan menjadi negara *pioneer* pertama yang diakui dunia sebagai negara yang memiliki pusat pelatihan tentara perdamaian bertaraf internasional. Tercatat bahwa PMPP menyediakan fasilitas 7 in 1 yang berupa: (1) *Peacekeeping Cente*r (PKC), (2) *Standby Force,* (3) Counter *Terorism Training Ground,* (4) *Huminatarian Assistant and Disaster Relief / Hard Training Ground,* (5) *Indonesian Defense University* (IDF), (6) *Language Center,* dan (7) *Military Game Committee.*

Pemerintah Indonesia sendiri ingin membuat standard pelatihan bagi tentara perdamaian mengingat tentara perdamaian yang mengikuti pelatihan datang dari berbagai negara dimana mereka juga sebelumnya mendapat pelatihan dari negara asal yang berbeda pula. Dengan adanya standar pelatihan bahasa Inggris, diharapkan dimasa yang akan datang para tentara perdamaian dapat berkosentrasi penuh pada kegiatan belajar mengajar bahasa yang akan para peserta ikuti.

Pada kesimpulannya, tentara perdamaian yang akan belajar bahasa Inggris pada *Peacekeeping English Project* diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi pendidikan dengan mengikuti semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di lembaga dengan penuh rasa tanggung jawab.

Setelah belajar di kelas *Peacekeeping English Project* tentara perdamaian tersebut juga dapat mempererat komunitas bahasa, dengan memberikan kontribusi positif dan konstruktif bagi peningkatan kualitas pendidikan.

4.2. Kegiatan Dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB

Peacekeeping English Project (PEP) adalah suatu bentuk program kerjasama yang dijalankan oleh Pusat Misi Perdamaian TNI, Kementrian Pertahanan Negara Inggris, dan *British Council*. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tentara perdamaian Indonesia. Dalam pelaksanaannya program *Peacekeeping English Project* ini adalah salah satu bagian dari *Pre-Deployment Training* (PDT).

Pre-Deployment Training (PDT) adalah suatu pelatihan yang ditujukan untuk para tentara perdamaian yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian PBB dimana mereka dibekali dengan berbagai aspek yang dapat menunjang keberhasilan misi yang akan dilaksanakan. Pembekalan tersebut dapat berupa pengenalan terhadap negara tempat misi berlangsung, pembelajaran tentang *survival skills* and *techniques*, dan kelas bahasa. *Pre-Deployment Training* ini terdiri dari 1 (satu) bulan pelatihan dan pembelajaran dikelas dan 1 (satu minggu) pengenalan dilapangan.

Pre-Deployment Training ini tidak hanya memperkuat dan menyempurnakan keterampilan para tentara perdamaian yang telah diperoleh, tetapi juga menjamin mereka sepenuhnya terlatih dalam penggunaan setiap kendaraan tertentu, teknologi

atau sistem persenjataan mereka akan menggunakan dalam misi. PMPP juga mempersiapkan mereka untuk menangani dengan benar dan tepat dengan warga lokal yang akan mereka temui.

Kelas bahasa Inggris adalah bagian dari *Pre-Deployment Training* (PDT). Tentara-tentara yang akan diberangkatkan akan dilatih untuk dapat fasih menggunakan bahasa Inggris untuk keperluan misi mereka. Seperti kita ketahui bahwa bahasa asing yang dipergunakan untuk masyarakat internasional adalah bahasa Inggris, juga sebagai tambahan bahwa materi pelatihan dan buku manual yang digunakan berasal dari PBB dan buku manual tersebut semuanya menggunakan bahasa Inggris.

Adapun jumlah jam belajar tentara perdamaian adalah selama 2 sampai 3 jam per minggu atau 9 sampai dengan 12 jam per bulan. Disamping itu, pengajaran bahasa Inggris tidak hanya di ajarkan lewat kelas *Peacekeeping English Project*, namun diintegrasikan juga dengan pelajaran lain sesuai dengan *course* yang berlaku di *Pre-Deployment Training* (PDT). Semua tentara perdamaian diarahkan untuk menggunakan bahasa Inggris secara aktif baik didalam kelas *Peacekeeping English Project*, maupun diluar kelas melalui materi lain yang mereka pelajari.

Kegiatan yang dilakukan selama tentara perdamaian mengikuti kelas *Peacekeeping English Project* adalah menerima materi dari instruktur pengajar kemudian mempraktekannya dalam bentuk *role play* atau bermain peran, kemudian mengisi lembar kerja yang masing-masing dipegang oleh tentara tersebut.

Para tentara bermain peran seperti halnya ketika mereka sedang berada ditempat misi berlangsung secara berpasangan *(peer)* maupun secara berkelompok *(group)*.

4.2.1. Materi Pengajaran *Peacekeeping English Project* (PEP)

Jenis keterampilan berbahasa yang lebih ditekankan adalah kemampuan berbahasa untuk komunikasi sehari-hari (*English for Communication*) yang terdiri dari latihan berbicara *(speaking)* dan mendengarkan *(listening)*, kemudian ditunjang pula dengan kemampuan membaca *(reading)*. Seperti contohnya membaca peta dan radar kemudian mengkomunikasikannya dengan sesame tentara perdamaian yang lain. Adapun beberapa contoh materi yang diajarkan dalam kelas *English for Peacekeepers* adalah sebagai berikut:

1. *Introduction to Peacekeeping*
2. *Ethics and rights*
3. *Sexual exploitation and abuse*
4. *Demining*
5. *Observers and liaison*
6. *Negotiation*
7. *Emergency situations*
8. *Checkpoints*
9. *Patrolling*
10. *UN civilian police*

Selain materi dikelas, para tentara perdamaian dapat mengakses materi lain secara online pada situs *British Council* (britishcouncil.org). Materi-materi tersebut digunakan pada pengajaran dikelas dan untuk pemebalajaran mandiri sebagai *self-access centre* yang terdiri dari:

1. *A Military English skills* book (*Breakthrough*) atau buku Manual untuk Militer berbahasa Inggris.
2. *Listening materials for Self-Access* Centres atau Materi mendengarkan
3. *Use of visual authentic training materials* Materi visual yang otentik
4. *Human rights materials* atau materi tentang Hak Asasi Manusia

Semua materi yang diajarkan pada kelas *Peacekeeping English Project* berasal dari PBB dan semua materi telah disesuaikan dengan standard yang berlaku saat ini yaitu STANAG 6001.

STANAG atau *Standarization Agreement*, adalah sebuah standard militer internasional yang dibuat oleh *North Atlantic Treaty Organisation* (NATO) untuk merumuskan perlengkapan, prosedur, taktik, pelatihan dan persiapan apa saja yang diperlukan oleh suatu pasukan dari negara-negara yang berbeda apabila negara-negara tersebut melakukan kerjasama pada suatu latihan gabungan atau misi perdamaian.

STANAG 6001 adalah suatu takaran profisiensi atau kemahiran dalam kebahasaan yang mengukur kemampuan bahasa secara individu dalam militer disetiap negara yang berbeda.

Skala tersebut berisi dari satu set penjelasan tentang kemampuan yang dicapai dalam segi bahasa dan dibagi menjadi enam 6 (enam) level dan diberikan kode 1 sampai 6 dan dijabarkan sebagai berikut:

1. Level 0 *No Practical proficiency*
2. Level 1 *Elementary*
3. Level 2 *Fair (Limited working)*
4. Level 3 *Good (Minimum Professional)*
5. Level 4 *Very Good (Full Professional)*
6. Level 5 *Excellent (Native/Billingual)*
7. *Language Proficiency* is recorded with a profile of 4 digits indicating the specific skills in the following order: *Listening, Speaking, Reading and Writing*.

4.2.2. Proses Belajar *Peacekeeping English Project* (PEP)

Data keadaan proses belajar dikumpulkan dari peserta didik dari minggu ke minggu selama mereka belajar dikelas *Peacekeeping English Project* (26-07-2013). Pada minggu pertama, materi telah ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan identitas diri dan membangun motivasi untuk belajar, mengikuti Dornyei L2 *self-system* (Dörnyei 2005, 2009) dengan maksud agar para tentara perdamaian mulai membentuk visualisasi diri mereka *(textual identity).* Sebagai tambahan, untuk mengaktifkan keaktifan mereka, para tentara perdamaian tersebut ditugaskan untuk membuat sebuah *role model* dan mendiskusikan seorang *role model* dari seorang tentara perdamaian yang sukses.

Diharapkan penggambaran *role model* ini akan memotivasi mereka untuk menjadi seorang tentara perdamaian yang handal juga seorang *English speaker* yang memiliki kemampuan bahasa yang baik.

Pada minggu kedua, materi yang dirancang memungkinkan tentara perdamaian untuk menjelajahi jalur ke masa depan dan untuk melihat peran bahasa Inggris dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik bisa mengidentifikasi, mengembangkan dan mendorong mereka untuk berperan dalam kegiatan di misi perdamaian dan menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Diharapkan para tentara perdamaian dapat menempatkan diri mereka dengan baik sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan di misi tersebut.

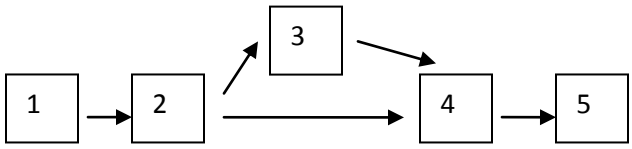
Pada minggu ketiga, fokus belajar dikhususkan terhadap penggunanaan bahasa Inggris dilapangan. Dengan menggunakan beberapa contoh kejadian darurat (*emergency call*), para tentara perdamaian diharuskan untuk member instruksi penyelamatan dengan bahasa Inggris agar semua penduduk maupun tentara lain mengerti instruksi mereka tersebut. Bahasa Inggris dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk penyelamatan.

Pada minggu keempat, tentara perdamaian menunjukkan kesadaran dari tuntutan yang ditempatkan atas mereka sebagai anggota masyarakat dan *Supercommunity*. Para tentara perdamaian sudah menunujukan perubahan tingkatan kemampuan bahasa kearah yang lebih positif dengan grammar yang terbatas namun mereka dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari.

4.2.3. Prosedur Penempatan Tentara Perdamaian Pada Program *Peacekeeping English Project* (PEP)

Program *Peacekeeping English Project* di Indonesia ini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun (2012 - 2013) dengan jumlah kelas yang telah dilaksanakan sebanyak 50 pertemuan. Setiap angkatan bisa terdiri dari 76 sampai dengan 956 partisipan per kelasnya tergantung dari jumlah tentara yang dibutuhkan untuk satu misinya. Adapun prosedur pelatihan yang tentara perdamaian jalani sebelum diberangkatkan pada misi perdamaian PBB menurut Mr. Colm Downes (14-08-2013) adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2. Alur Penempatan tentara Perdamaian bagi PBB



Keterangan :

1. : Tentara (unit)
2. : PMPP
3. : Mengikuti kelas *Peacekeeping English Project*
4. : Pusdiklat Bahasa Kemhan
5. : Persiapan Pemberangkatan

Gambar diatas menerangkan bahwa sebelum pasukan perdamaian Indonesia bagi PBB diberangkatkan mereka harus melalui lima tahap, yaitu:

Pertama, pasukan didatangkan dari unit lalu mengikuti seleksi penerimaan Pasukan Perdamaian yang terdiri dari test tulis pengetahuan umum dan tes fisik.

Kedua, tentara yang telah masuk dan terseleksi akan dilatih atau ditraining PMPP atau disebut juga sebagai *Pre-Deployment Program* selama satu bulan dikelas dan satu minggu berlatih dilapangan.

Ketiga, pasukan yang mengikuti PDT otomatis akan mendapatkan pengajaran bahasa asing dikelas *Peacekeeping English Project* (PEP) yang terdiri dari *senior officers* dan *low officers* dan dilatih dengan instruktur asing atau native speaker dari British Council. Bagi *senior officers* mereka hanya sekali mendapatkan pelatihan bahasa Inggris di *Peacekeeping English Project*, namun bagi low officers (seperti MILOBS atau *Millstaff*) mereka akan mendapat dua kali pelatihan lebih lanjut di Pusat Pendidikan dan Latihan Bahasa Kementrian Pertahanan R.I di Pondok Labu - Jakarta Selatan. Para *low officers* ini sengaja diberikan dua kali training mengingat merekalah yang akan terjun langsung ke lapangan dan bertemu dengan penduduk lokal dan juga sesama tentara perdamaian dari negara lain.

Yang kelima, setelah para officers ini mengikuti pelatihan bahasa baik dari *British Council* maupun Pusat Pendidikan dan Latihan Bahasa Pondok Labu maka mereka akan menghadapi persiapan sebelum pemberangkatan di PMPP selama 1 minggu untuk mempersiapkan fisik maupun mental mereka. Adapun lama misi bergantung pada kebutuhan (1 tahun dan bisa diperpanjang lagi).

Secara jelas Mr. Colm (14-08-2013) dalam wawancaranya menerangkan bahwa pada tahun 2013 ini Indonesia menargetkan untuk memberangkatkan sekitar 1600-1800 pasukan yang terbagi dalam beberapa jadwal yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2013 kelas *Peacekeeping English Project* terdiri dari 76 partisipan dimana mereka adalah sebagai UN *Military Observer* (UNMO).
2. Pada bulan Juni 2013 kelas *Peacekeeping English Project* terdiri dari 956 partisipan yang telah diberangkatkan dalam misi PBB ke Libanon.
3. Pada bulan November 2013 mendatang aka nada 800 orang partisipan dalam kelas *Peacekeeping English Project* yang akan diberangkatkan ke Darfur.
4. Dan sisanya belum dijadwalkan sebanyak 176 akan diberangkatkan ke Haiti dan 176 lainnya akan diberangkatkan ke Kongo.

Tentara perdamaian tersebut terdiri dari baik laki-laki maupun perempuan, dan semua tentara yang berpatisipasi dalam kelas *Peacekeeping English Project* ini menunjukkan semangat belajar yang sangat tinggi. Mereka memiliki tekad dan motivasi yang tinggi untuk dapat menguasai bahasa Inggris dan hal tersebut menjadi tantangan bagi instruktur untuk dapat menjadikan mereka handal baik secara *tactical* dan juga dalam segi kebahasaaan.

4.3. Kendala dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB

Dalam praktek pelaksanaan *Peacekeeping English Project* di PMPP TNI dilaksanakan oleh suatu tim gabungan yang terdiri dari tim instruktur bentukan TNI dan pengajar bahasa, dimana sampai dengan pertengahan 2013 hanya ada 1 pengajar bahasa Inggris dari British council yaitu Mr. Colm Downes. Beliau memaparkan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan *Peacekeeping English Project* kedalam empat masalah utama yaitu: (1) jumlah siswa yang besar, (2) perbedaan tingkat kemampuan bahasa, dan (3) tidak adanya batasan minimum untuk mengikuti kelas *Peacekeeping English Project* dan (4) minimnya instruktur atau pengajar bahasa inggris di PMPP.

Kendala yang pertama yaitu kesulitan dalam mengajar kelas dengan jumlah murid yang banyak. Setiap batch atau angkatan yang mengikuti kelas dalam *Peacekeeping English Project* bervariasi tergantung dari jenis misi yang akan ditugaskan. Colm menjelaskan bahwa dia pernah mengajar kelas dengan jumlah mulai dari 76 sampai dengan 956 murid dengan hanya satu instruktur bahasa Inggris yang mengajar dibantu dengan microphone dan slide.

Kendala yang kedua yaitu perbedaan tingkat kemampuan bahasa antar individu. Kelas dalam *Peacekeeping English Project* terdiri dari berbagai latar belakang individu yang berbeda juga dengan kemampuan bahasa yang beragam. Tentara-terntara tersebut terdiri dari berbagai kalangan. Untuk *officer* dan senior *officer* mereka memiliki kemampuan bahasa yang sudah memadai, sedangkan *low*

officer mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kurang memadai. Sehingga dalam prakteknya, para tentara perdamaian tersebut ada yang dapat menangkap materi secara baik namun ada pula yang masih kesulitan memahami baik materi yang disampaikan ataupun yang mereka pelajari dengan menggunakan bahasa Inggris tersebut.

Kendala yang ketiga yaitu tidak adanya batasan minimum untuk mengikuti kelas *Peacekeeping English Project*. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, *Peacekeeping English Class* diikuti oleh berbagai tentara dari berbagai tingkatan dengan kemampuan yang berbeda. Seharusnya ada standar kemampuan yang dipergunakan untuk menyaring para tentara tersebut, sesuai dengan rekomendasi Colm yaitu dengan batasan *Low Intermediate English*.

Colm juga menambahkan bahwa kurangnya waktu bagi para prajurit juga merupakan salah satu kendala yang harus diperhatikan, karena para pasukan perdamaian Indonesia ini tidak mempunyai waktu yang cukup untuk belajar bahasa Inggris secara intensif.

Untuk mengatasi berbagai kendala yang di hadapi seperti yang dijelaskan sebulumnya, Colm mengatakan dia tetap berusaha untuk terus memotivasi para pasukan perdamaian Indonesia untuk tetap mempelajari bahasa Inggris dan memberikan beberapa cara untuk mempelajari bahasa Inggris sendiri agar para prajurit pasukan perdamaian Indonesia bisa tetap mempelajari bahasa Inggris diluar kelas.

Dalam wawancaranya Colm menjelaskan beberapa usaha yang dia lakukan adalah yang pertama para senior officer diharapkan mau memberikan sebagian waktunya untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada low officer yang masih memiliki kemampuan bahasa Inggris yang rendah.

Yang kedua adalah dengan memberikan batasan atau *a minimum low English recruitment* yang terdiri dari *minimum recruitment* (low intermediate) bagi tentara yang ingin mendaftarkan diri sebagai pasukan perdamaian Indonesia, dan *a higher recruitment* dibutuhkan ketika tentara dipromosikan naik jabatan. Sebelum dipromosikan naik jabatan tentara tersebut harus mendemonstrasikan kemampuan bahasa Inggrisnya.

Yang ketiga adalah karena keterbatasan waktu dalam mengajarkan para pasukan perdamaian Indonesia ini, selain mengajarkan bahasa Inggris, Colm pun memberikan insturksi lain agar para prajurit bisa tetap belajar bahasa Inggris diluar kelas seperti memberi *slide,* makalah untuk dipelajari, situs-situs internet untuk mereka belajar bahasa Inggris, buku-buku apa saja untuk melatih bahasa Inggris mereka, dan untuk kedepannya colm sedang memproduksi sebuah buku untuk para pasukan perdamaian ini yang bisa dengan mudah dibawa para pasukan perdamaian kemana saja termasuk ketika sedang menjalani misi, *dan interactive online training material.* Colm juga berharap dan percaya kedepannya akan ada yang berdedikasi untuk menjadi instruktur bahasa Inggris di PMPP bagi pasukan perdamian Indonesia dan itu bisa darimana saja, seperti dari militer (dari angkatan udara, darat atau laut), warga sipil, polisi, dan lainnya.

Sebagai bukti keseriusan Kementrian Pertahanan Inggris dan *British Council* dalam usahanya mengembangkan pengajaran bahasa Inggris di Pusat Misi Penjaga Perdamaian (PMPP) TNI, maka British Council kemudian mengadakan *event* berupa Seminar *"English for Uniformed Forces"* pada tanggal 26 sampai dengan 28 Juni 2013 yang bertempat di Auditorium PMPP Sentul – Bogor dan Novotel Bogor.

Seminar tersebut disponsori oleh Kementrian Pertahanan Inggris dimana mereka berkomitmen untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan internasional melalui peranan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Event ini menghadirkan berbagai kalangan Militer Indonesia seperti TNI, Polisi, Kementrian Pertahanan R.I dan juga mengundang berbagai pakar dalam bidangnya. Proyek ini adalah contoh dari kerjasama yang membawa internasional partner untuk kepentingan bersama.

Dalam seminar ini juga dibahas berbagai kendala lain yang ditemukan dalam pengajaran kelas bahasa bagi tentara perdamaian. Hal tersebut juga diungkapkan oleh 3 (tiga) pakar ahli (26-06-2013) yaitu: (1) Kolonel A. Adipatikarnawijaya, Pscj, M. M., (2) Laksamana TNI Ir. Paruntungan Girsang, M.Sc., M.A., dan (3) Drs. Muhammad Nur Usman, MBA.

Pertama, Kolonel A. Adipatikarnawijaya, Pscj, M. M. (Direktur Hubungan Internasional PMPP) menerangkan bahwa sangat sulit mengajarkan para tentara perdamaian karena mereka memiliki kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Kemudian dikarenakan jumlah siswa dalam satu kelas yang besar, maka siswa banyak yang tidak memperhatikan dengan seksama dan konsentrasi mereka banyak

yang terpecah. Hal tersebut dikarenakan PMPP tidak memberikan test penempatan *(Placement Test)* untuk para tentara yang ingin bergabung dalam unit penjaga perdamaian mereka hanya mengikuti test tulis dan test fisik sehingga kemampuan bahasa asing mereka tidak diketahui secara mendetail.

Kedua, Laksamana TNI Ir. Paruntungan Girsang, M.Sc., M.A. (Kepala Pusdiklat Bahasa Kementrian Pertahanan R.I) menjelaskan kesulitan mengajar bahasa Inggris bagi tentara perdamaian Indonesia adalah mengetahui fakta bahwa dalam satu kelas diisi dengan jumlah siswa yang besar (240 siswa/kelas) dan setiap siswa nya memiliki motivasi yang berbeda, ada yang sangat termotivasi dan ada yang tidak.

. Kesulitan lain yaitu pada saat misi berlangsung biasanya kekurangan penerjemah (*interpreter*) karena minimnya tingkat kemampuan bahasa tentara perdamaian tersebut maka dalam satu unit terkadang hanya bergantung pada satu orang yang menguasai bahasa asing.

Yang terakhir, Drs. Muhammad Nur Usman, MBA. (Lembaga Pendidikan Bahasa dan Pelatihan Sekolah Bahasa POLRI) menerangkan bahwa setiap tentara perdamaian yang akan diberangkatkan misi harus memiliki standard seperti memiliki sertifikat test TOEFL dengan minimum nilai 400 (Brigadir). Hal tersebut sangant disarankan agar mereka yang akan mengikuti misi untuk dapat bias berbahasa asing tidak hanya bahasa Inggris, namun bahasa lokal setempat seperti bahasa Arab dan lainnya.

Dari ketiga kendala yang telah disampaikan tiga orang pakar tersebut, dapat disimpulkan bahwa tentara perdamaian Indonesia memiliki sifat kelas yang heterogen yang terbentuk dari banyak dan beragam latar belakang dan hanya beberarapa tentara yang memiliki kualifikasi bahasa yang memadai. Kendala tersebut dapat diminimalisasi dengan cara menambahkan syarat dalam persyaratan mengikuti test seleksi tentara perdamaian dengan sertifikat TOEFL dan mengadakan *placement test* bahasa Inggris secara terpisah.

Seorang *officer* dari TNI yang telah mengikuti misi perdamaian PBB di *United Nation Mission in South Sudan* (UNMISS), Eppy Dortua Sinaga (2 April 2012 – 2 April 2013), menjelaskan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang dipergunakan oleh hampir semua *peacekeepers* di misi perdamaian PBB. Bahasa Inggris tersebut tidak hanya gunakan oleh pasukan berseragam namun juga digunakan oleh para *civilian*, dan para sukarelawan yang berada dibawah bendera PBB juga menggunakannya untuk berkomunikasi dalam misi tersebut. Dalam misi UNMISS ini Sinaga bertugas sebagai advisors yang juga merangkap sebagai pengajar dan mentor bagi SSNPS *(South Sudan National Police Service).* Selama setahun menjalankan misi, dia mengajar *Police Science*, bahasa Inggris dan Komputer bagi tentara Sudan. Bahasa seringkali menjadi masalah bagi *Police Advisor* untuk menjalankan misi UNMISS karena tidak semua polisi local di Sudan dapat berbicara bahasa Inggris.

Pada kesimpulannya, tentara Indonesia yang memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang tinggi kemudian diperbantukan sebagai guru bagi polisi setempat di

Sudan. Terlihat jelas sekali bahwa kebutuhan bahasa Inggris sangatlah signifikan dalam menjalankan misi-misi kemanusiaan PBB.

Bahasa Inggris juga sangat penting tidak hanya untuk penjalanan misi didarat namun penting untuk kelangsungan misi diudara. Para tentara perdamaian akan belajar bagaimana melayani datangnya *supply* barang bantuan, mengirimkan berbagai macam barang seperti peralatan medis dengan tim dari negara lain. Berkomunikasi dengan tentara perdamaian yang ada didarat, didalam pesawatpun semuanya dilakukan dengan bahasa Inggris juga dalam usaha pembersihan area termasuk turun ke perkampungan dan membabak hutan.

Selain itu Kolonel Yury Prizigley yang bertugas di UNMO (*United Nation's Military Observer*) yang juga bersama dengan kontingan pasukan perdamaian Indonesia di *South Sudan* mengutarakan bahwa dia mengapresiasi pasukan lain yang bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Semua kegiatan di *South Sudan* adalah menggunakan bahasa Inggris. Patroli dan *briefing* antar pasukan juga menggunakan bahasa Inggris serupa dengan komunikasi dengan penduduk lokal. Kebutuhan akan bahasa Inggris juga sangat diperlukan tidak hanya dapat berbicara, mendengar, tapi juga membaca dalam bahasa Inggris. Seperti membaca laporan dan mendengarkan pesan dari radio yang sering kali berkualitas rendah. Kehadiran para penterjemah juga akan menambah tekanan apabila sewaktu-waktu camp atau pengungsi diserang maka tidak ada waktu untuk mengandalkan penterjemah.

4.4 Prospek *Peacekeeping English Project (PEP)* dalam meningkatkan kemampuan bahasa inggris Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB

Suatu program baru dari *British Council* untuk membantu melatih para pasukan perdamaian PBB yang menjalin kemitraan dengan Pusat Misi Penjaga Perdamaian (PMPP) dan didanai oleh Kementrian Pertahanan Inggris menunjukan komitmennya untuk mendukung dan menjaga keamanan internasional dan kesejahteraan dan membuktikan bahwa bahasa Inggris mempunyai peran dalam hal tersebut. Program ini merupakan salah satu contoh hubungan kerja sama antar budaya yang membawa kemitraan internasional dari sektor yang berbeda untuk kepentingan bersama.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mendukung pembangunan suatu pusat pelatihan untuk para tentara perdamaian PBB. Seperti yang dijelaskan oleh Liutenant Colonel Victor George, Kepala dari bagian hubungan internasional di Pusat Misi Penjaga Perdamaian (PMPP) bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan usahanya menjaga perdamaian dunia. Indonesia telah menjalin kemitraan dengan *British Council* untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris dari tentara perdamaian dan instruksi diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

Danny Whitehead, *Head of English Language Development* di *British Council* Indonesia menyoroti bahwa bahasa Inggris memiliki peranan utama dalam misi perdamaian. Peranan utama tersebut adalah untuk memfasilitasi kerjasama *(interoperability)* dengan tentara perdamaian dari negara lain dalam misi perdamaian PBB, dan untuk meningkatkan faktor penunjang dari kefektivitasan operasi

perdamaian. Sebuah kapasitas dari bahasa Inggris juga sangat penting bagi tentara perdamaian agar dapat berkomunikasi secara lebih baik dengan penduduk lokal pada saat penugasan.

Berbicara dari pengalaman sebagai mantan dari *Project Manager* di Kongo, Danny juga menambahkan bahwa bahasa Inggris dapat menjadi alat untuk membantu pasukan keamanan Indonesia untuk menyatu dengan pasukan keamanan dari negara lain, membantu dan menguatkan rasa saling pengertian, perdamaian dan keamanan.

Peacekeeping English Project di Indonesia berkerja dengan sangat erat dengan PMPP Indonesia untuk membangun materi khusus untuk para tentara penjaga perdamaian Indonesia. Bahasa Inggris secara fungsional dilapangan, dengan area pelatihan seperti Hak Asasi Manusia (HAM), perlindungan penduduk dari kekerasan seksual dan kekerasan berbasis *gender*.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya *Peacekeeping English Project* ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kualitas tentara pasukan perdamaian Indonesia, namun ada juga tujuan lain yang ingin dicapai. Yaitu, yang pertama adalah untuk menjadi negara pertama yang menjadi pusat pelatihan tentara pasukan perdamaian di Asia terutama Asia Tenggara dan yang kedua adalah ketika tujuan untuk menjadi pusat pelatihan di Asia Tenggara, maka Indonesia akan mendapatkan pengakuan dari PBB secara legal dan dunia, sebagai negara *pioneer* pertama di dunia yang mempunyai pusat pelatihan tentara pasukan perdamaian di dunia.

Menurut Colm, untuk mencapai 2 (dua) tujuan tersebut tidaklah mudah. Karena ada beberapa faktor yang masih harus diatasi. Yaitu yang paling utama adalah bahasa, seperti yang sudah dijelaskan, bahasa merupakan instrumen penting dalam berkomunikasi, ketika Indonesia ingin menjadi pusat pelatihan di wilayah Asia Tenggara maka yang paling utama adalah semua elemen yang ada di PMPP haruslah bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena ketika tentara pasukan perdamaian dari negara-negara lain berkumpul, akan ada banyak bahasa yang dipergunakan, dan hal itu tentunya bisa merepotkan. Untuk itu digunakan lah bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional dan juga bahasa umum yang digunakan para negara-negara di Asia Tenggara.

Yang kedua adalah faktor standarisasi pelatihan yang harus dijalani ketika ingin menjadi *peacekeeper*, Mr.colm menerangkan, ketika anda ingin menjadi *peacekeeper* di India, di Indonesia, atau di tempat lainnya itu anda menjalani pelatihan yang berbeda-beda, maka ketika Indonesia ingin menjadi pusat pelatihan utama di Asia Tenggara, harus ada standarisasi pelatihan yang sama untuk menjadi *peacekeeper*, dari mulai materi, bahasa dan lain-lain dan untuk saat ini belum ada standarisasi yang sama di setiap pusat pelatihan perdamaian. Karena akan sangat sulit menyatukan *peacekeeper* dari berbagai belahan dunia, ketika mereka memiliki pelatihan yang berbeda-beda di negaranya masing-masing dan kemampuan bahasa Inggris yang berbeda. Seperti yang Colm selalu sarankan, seharusnya ada standarisasi *minimum English recruitment test* untuk menjadi seorang *peacekeeper*.

Indonesia sendiri sudah menunjukkan niatnya untuk menjadikan PMPP Indonesia ini sebagai Pusat Pelatihan Tentara Pasukan Perdamaian di Asia tenggara dengan berbagai gedung dan fasilitas yang sudah di bangun untuk menunjang dan mencapai tujuan-tujuannya, seperti Auditorium PMPP yang sering difungsikan untuk berbagai kegiatan diantaranya Seminar, Symposium, Upacara dalam ruangan, Pertunjukkan, dan lain-lain. Gedung ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya audio visual canggih, layar monitor, internet, tempat duduk berkapasitas 400 orang, panggung, tata lampu, AC, ruang tunggu VIP, dan lain-lain. Barak Prajurit, bangunan ini merupakan bangunan terbesar di PMPP Indonesia, karena dibandingkan bangunan yang lain, bangunan ini mempunyai 3 lantai dan mampu menampung 300 prajurit setiap unitnya, sehingga berdasarkan rencana pembangunan nantinya akan ada 5 unit sehingga diharapkan mampu menampung 1500 prajurit untuk setiap latihan. Fasilitas pendukung yang berada didalam barak diantaranya adalah tempat tidur, meja belajar, almari, kamar mandi, ruang jemuran, internet, tv, mesin cuci, serta perlengkapan lain untuk mendukung akomodasi prajurit.

Gedung lainnya adalah mess mancanegara, bangunan yang berbentuk rumah singgah ini merupakan mess yang digunakan untuk peserta/siswa mancanegara yang mengikuti kegiatan di PMPP. Terdapat 40 unit mess yang disediakan oleh PMPP dimana untuk setiap unitnya disediakan fasilitas tempat tidur, almari pakaian, meja kursi dan sofa, tv dan jaringan tv kabel, internet, kamar mandi dan toilet, tempat setrika dan setrika, AC, dan lain-lain. Ruang kelas, bangunan ini merupakan ruang kelas PMPP yang sering digunakan khususnya untuk diskusi kegiatan sindikat,

pemberian materi dan teori, maupun kegiatan lain yang membutuhkan ruangan kecil. Tiap bangunan dibagi dalam 3 (tiga) ruangan kecil yang artinya terdapat 9 (sembilan) ruangan yang bisa digunakan, dimana tiap ruangan dilengkapi dengan berbagai macam peralatan pendukung kegiatan belajar, diantaranya peralatan audio visual, meja dan kursi kelas, AC, dan lain-lain.

Lalu ada Aula PMPP, gedung yang cukup luas ini merupakan aula atau gedung serba guna PMPP yang sering digunakan dalam berbagai kegiatan yang memerlukan tempat yang luas, misalkan kegiatan seminar, pertemuan, persentasi, dan lain-lain. Karena gedung ini memiliki kapasitas untuk menampung 1500 prajurit, fasilitas yang digunakan dalam gedung ini diantaranya adalah peralatan audio visual, kursi lipat untuk peserta, panggung, ruang tunggu VIP, kantin, kamar mandi dan toilet, dan lain-lain (http://www.pkc-indonesia.com/index.php/profil/fasilitas-pmpp-tni, diunduh 26 Agustus 2013).

Berangkat dari berbagai jenis fasilitas yang tersedia di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian yang begitu lengkap, dan didukung oleh pengajaran bahasa Inggris lewat *Peacekeeping English Project* maka diharapkan untuk prospek di masa yang akan datang Indonesia mampu meningkatkan jumlah kontribusinya dalam pasukan perdamaian. Hal tersebut dijelaskan oleh Brigjen Imam Edy Mulyono, M.Sc, MSS dalam diskusi bertajuk 'Indonesia sebagai *Rising Middle Power*' [16-05-12]. Beliau memastikan bahwa setidaknya dalam dua tahun ke depan (2014), diharapkan jumlah itu akan meningkat menjadi 4.000 prajurit.

Tidak hanya bertambah dalam jumlah, pasukan perdamaian asal Indonesia juga diharapkan mampu duduk pada posisi-posisi penting dalam misi perdamaian PBB.

Menurut Rochdi, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Gajah Mada yang juga menjadi narasumber dalam diskusi tersebut [16-05-12], kemampuan Indonesia dalam mengirimkan pasukan perdamaian dapat menaikkan persepsi, atau image bangsa Indonesia, pada level internasional. Artinya, persepsi negara Indonesia di mata internasional cukup baik, dan Indonesia sudah mulai memperoleh perhatian lagi ke level internasional. Rochdi juga menambahkan bahwa pengiriman pasukan perdamaian ini memerlukan pengawasan dari pihak sipil yang dimaksudkan untuk mendorong dan menjaga profesionalisme mereka. Agar kemudian hari tentara yang dikirim memiliki dedikasi yang tinggi sekaligus professional terhadap misi yang mereka jalani. (http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-tingkatkan-jumlah-pasukan-perdamaian/666740.html diunduh 28 Agustus 2013).

Bahasa Inggris dalam kaitan penambahan jumlah personel tentara perdamaian adalah sebagai sarana diplomasi Indonesia. Tentara perdamaian yang dikirim keluar negeri secara otomatis menjadi wakil dari negara Indonesia dalam mempromosikan Indonesia, dimana keberhasilan para tentara perdamaian Indonesia dalam membina hubungan baik dengan masyarakat setempat, pada akhirnya membuahkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan operasional tentara perdamaian Indonesia dan keberhasilan para tentara Indonesia dalam memenangkan *hearts and minds of people*.

Hal ini akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia yang tentunya akan sangat membantu Indonesia di dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.